

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan PM yang melibatkan informasi genetik pasien memunculkan beberapa isu sekaligus menjadi tantangan, diantaranya adalah masalah hukum berupa perlindungan data genetik pasien dalam bentuk peraturan perundang-undangan, privasi pasien yang mengarah pada kerahasiaan dan keamanan data, diskriminasi genetik, serta biaya yang besar.
2. Ketiadaan hukum yang jelas dan spesifik mengenai penggunaan RME menjadi salah satu alasan RME belum diterapkan secara luas di Indonesia. Selain itu terdapat tantangan etika dan hukum dalam penerapannya yaitu terkait privasi, kerahasiaan, dan keamanan data, berbagi data atau pertukaran data, pergeseran hubungan pasien dengan dokter, dan perubahan alur kerja dalam praktik klinis. Sedangkan hambatan yang dirasakan yaitu biaya yang tinggi, serta kurangnya keandalan dan interoperabilitas.
3. Dukungan teknologi berupa RME dalam pelaksanaan PM dibutuhkan untuk menunjang keberhasilannya dan memudahkan untuk pengambilan keputusan. Namun terdapat etika dan hukum penggunaan RME dalam era PM diantaranya adalah kepemilikan dan privasi data, kerahasiaan dan keamanan data pasien, diskriminasi genetik serta tanggung jawab hukum berupa peraturan perundang-undangan.

4.2 Saran

1. Bagi negara yang belum memiliki peraturan perundang-undangan untuk melindungi pasien dari diskriminasi genetik perlu mengatur lebih lanjut dan segera disahkan agar negara tersebut mempunyai regulasi utama dalam pelaksanaan PM dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena terdapat jaminan khusus yang menaungi.

2. Model layanan RME berbasis *cloud* dapat menjadi pilihan untuk membantu fasyankes lebih berhemat. Selain itu perlunya *upgrade* pengetahuan dan kemampuan teknologi komputerisasi bagi setiap pihak yang terlibat.
3. Teknik keamanan data yang dapat dilakukan untuk melindungi data dan informasi pasien yaitu dengan memanfaatkan metode kriptografi, *firewall*, kontrol akses, dan teknik keamanan lainnya. Selain itu, regulasi lebih lanjut terkait penggunaan RME di era PM diperlukan sebagai jembatan untuk menangani berbagai masalah etika dan hukum yang ditimbulkan.